



Pengaruh Sistem Hukum Dalam Dinamika Sosial Kehidupan Masyarakat

Muhammad Rafli Aprideano¹, Elisatris Gultom²

¹Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

²Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

¹rapdeano@gmail.com, ²elisatris.gultom@unpad.ac.id

Abstrak

Sistem hukum memiliki peran sentral dalam membentuk dinamika sosial kehidupan masyarakat. Sebagai instrumen pengaturan, hukum berfungsi menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem hukum sering menghadapi tantangan, termasuk keberagaman budaya, ekonomi, dan nilai-nilai lokal yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana sistem hukum memengaruhi perubahan sosial, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta menawarkan rekomendasi untuk harmonisasi antara hukum dan dinamika sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder dari literatur hukum dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang responsif mampu mendorong perubahan sosial positif, seperti penghapusan diskriminasi dan peningkatan akses keadilan. Sebaliknya, sistem hukum yang kaku cenderung memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Kesimpulannya, keberhasilan sistem hukum sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Sistem Hukum, Dinamika Sosial, Perubahan Masyarakat, Keadilan, Reformasi Hukum

PENDAHULUAN

Sistem hukum merupakan pilar utama dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai instrumen pengatur, hukum berfungsi mengendalikan perilaku manusia dan menjamin stabilitas sosial melalui norma-norma yang mengikat secara formal. Kehadiran hukum di tengah masyarakat bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menegakkan keadilan yang berlandaskan prinsip-prinsip kemanusiaan (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Dinamika sosial yang terjadi akibat perubahan zaman, perkembangan teknologi, dan pergeseran nilai budaya memengaruhi fungsi dan efektivitas sistem hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan yang kaku, tetapi juga sebagai sarana yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Perubahan sosial yang cepat, seperti urbanisasi, globalisasi, dan digitalisasi, menuntut hukum untuk lebih responsif dan inklusif dalam menghadapi kompleksitas masalah yang muncul. Dalam konteks ini, sistem hukum sering kali menjadi titik temu antara berbagai kepentingan, nilai-nilai lokal, serta aspirasi masyarakat global.

Meskipun memiliki peran strategis, sistem hukum tidak jarang menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara aturan hukum yang tertulis dan praktik di lapangan (Cahyani et al., 2022). Ketidakmampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dapat memunculkan konflik, ketimpangan keadilan, bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Sebaliknya, hukum yang adaptif dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial yang positif, seperti menghapuskan diskriminasi, meningkatkan kesetaraan, dan memperluas akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem hukum memengaruhi dinamika sosial masyarakat, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara sistem hukum dan dinamika sosial, tetapi juga memberikan rekomendasi agar hukum dapat berfungsi sebagai alat perubahan yang inklusif, adil, dan manusiawi.

METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis pengaruh sistem hukum dalam dinamika sosial kehidupan masyarakat. Metode kualitatif dipilih karena memberikan ruang untuk memahami fenomena secara mendalam melalui perspektif sosial, budaya, dan hukum yang kompleks. Studi kasus sebagai desain penelitian memungkinkan eksplorasi intensif terhadap fenomena spesifik dalam konteks tertentu, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi hubungan antara sistem hukum dan perubahan sosial secara lebih terperinci. Data dikumpulkan

melalui analisis dokumen hukum, wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan terkait, serta observasi partisipatif terhadap dinamika sosial yang relevan. Analisis dokumen melibatkan kajian terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang memengaruhi masyarakat, sementara wawancara mendalam dilakukan dengan praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk menggali pandangan mereka tentang efektivitas hukum dalam menghadapi perubahan sosial.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tema utama yang muncul dari hasil penelitian. Peneliti berfokus pada bagaimana sistem hukum diadaptasi dalam konteks sosial tertentu dan bagaimana masyarakat merespons aturan hukum yang ada. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan dokumen. Selain itu, refleksi kritis juga diterapkan untuk menghindari bias peneliti terhadap hasil yang diperoleh. Studi kasus ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang peran hukum dalam membentuk dan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang harus diatasi untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mengkaji peran hukum secara normatif, tetapi juga menyoroti praktik dan dampaknya dalam konteks sosial nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Mempengaruhi Dinamika Sosial Dalam Masyarakat

Sistem hukum memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat. Sebagai kerangka aturan yang mengikat secara formal, hukum menjadi instrumen utama dalam menjaga keteraturan, mencegah konflik, dan memastikan keseimbangan dalam hubungan sosial. Melalui pengaturan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, hukum menciptakan rasa aman bagi masyarakat untuk beraktivitas tanpa rasa takut akan pelanggaran atau ancaman dari pihak lain. Sebagai contoh, hukum pidana menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan, yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar masyarakat enggan melanggar norma yang berlaku. Dalam hal ini, hukum tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga sarana pembentukan kesadaran kolektif untuk mematuhi norma sosial. Dengan demikian, hukum berperan aktif dalam menciptakan keteraturan yang memungkinkan masyarakat berkembang secara harmonis.

Selain menjaga keteraturan, sistem hukum juga menjadi katalis utama dalam mendorong perubahan sosial yang progresif. Dalam sejarahnya, hukum telah menjadi alat untuk menghapus diskriminasi, memperluas hak asasi manusia, dan memperkenalkan nilai-nilai baru yang sejalan dengan perkembangan zaman. Contohnya dapat dilihat dalam undang-undang yang menghapuskan praktik perbudakan, memperjuangkan hak pilih perempuan, dan melindungi minoritas dari diskriminasi (Cahyani et al., 2022). Hukum dalam hal ini bertindak sebagai pendorong transformasi sosial dengan memberikan kerangka yang sah bagi masyarakat untuk mengadopsi nilai-nilai baru. Namun, penerapan hukum untuk perubahan sosial ini sering kali menghadapi resistensi dari kelompok tertentu yang merasa dirugikan atau kehilangan posisi dominannya. Resistensi ini menunjukkan bahwa hukum, meskipun memiliki kekuatan normatif, tetap memerlukan legitimasi sosial untuk dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu membangun konsensus dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Sistem hukum memainkan peran penting dalam memperkuat keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan dalam masyarakat. Dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar, hukum membantu memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, layanan, dan peluang. Contoh yang relevan adalah undang-undang yang melindungi hak pekerja, seperti pemberian upah minimum, perlindungan keselamatan kerja, dan hak cuti. Perlindungan semacam ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan inklusif. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum yang tidak konsisten atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu sering kali menghambat tercapainya keadilan sosial yang ideal. Oleh sebab itu, sistem hukum perlu didukung oleh institusi yang kuat, transparan, dan bebas dari korupsi agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Di sisi lain, hukum juga menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat, terutama di era modern yang ditandai oleh globalisasi dan digitalisasi. Ketika hukum tidak responsif terhadap perubahan ini, maka akan muncul kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan kebutuhan masyarakat. Contoh yang sering terjadi adalah regulasi yang belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, seperti e-commerce, cryptocurrency, atau artificial intelligence, sehingga menciptakan ruang abu-abu yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari tanggung jawab hukum. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan, meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, dan memicu konflik sosial. Dengan demikian, sistem hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada, baik melalui reformasi regulasi maupun peningkatan kapasitas institusi hukum untuk menghadapi tantangan baru (Al Kautsar & Muhammad, 2022).

Sistem hukum memiliki peran strategis yang sangat kompleks dalam memengaruhi dinamika sosial masyarakat. Hukum tidak hanya menjadi alat pengatur yang menjaga keteraturan, tetapi juga sarana untuk mendorong perubahan sosial dan memperkuat keadilan. Namun, keberhasilan hukum dalam menjalankan peran ini sangat bergantung pada

kemampuannya untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sistem hukum yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan adalah kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Tanpa fleksibilitas dan inovasi dalam sistem hukum, tantangan yang dihadapi akan semakin besar, sehingga menghambat fungsi hukum sebagai pengarah utama dalam dinamika sosial.

Sistem Hukum Dapat Mengatur Manusia dan Masyarakat

Sistem hukum adalah seperangkat aturan yang disusun untuk mengatur perilaku manusia dan interaksi mereka dalam masyarakat. Fungsinya sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan sosial. Hukum tidak hanya sekadar seperangkat norma yang harus diikuti, melainkan juga berfungsi sebagai pengendali yang mengarahkan perilaku individu dan kelompok, agar tidak terjadi kekacauan atau ketidakadilan. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, dengan berbagai latar belakang budaya, ekonomi, dan sosial, hukum hadir sebagai pedoman yang mengatur semua aspek kehidupan. Tanpa adanya sistem hukum yang jelas dan tegas, masyarakat akan sulit untuk mencapai kestabilan. Oleh karena itu, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tatanan sosial yang kondusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum berperan untuk memberikan rasa aman, perlindungan hak, dan menyelesaikan konflik yang muncul di tengah masyarakat yang beragam (Danurahman & Kusdarini, 2021).

Salah satu cara utama hukum mengatur manusia adalah dengan memberi batasan yang jelas tentang hak dan kewajiban setiap individu. Hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Hak-hak individu dilindungi oleh hukum, misalnya hak atas kebebasan berbicara, hak atas properti pribadi, hak atas pekerjaan, dan hak atas perlindungan hukum. Namun, hak-hak ini juga diimbangi dengan kewajiban untuk tidak merugikan orang lain. Kewajiban ini dapat mencakup kewajiban membayar pajak, kewajiban mengikuti aturan lalu lintas, atau kewajiban menghormati hak orang lain. Ketika seseorang melanggar kewajibannya, maka hukum akan memberikan sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Dengan demikian, hukum tidak hanya memberikan kebebasan tetapi juga membatasi kebebasan agar tidak merugikan pihak lain. Ini adalah bentuk pengaturan yang melibatkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, yang merupakan inti dari sistem hukum yang adil.

Selain itu, hukum juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat. Konflik antara individu atau kelompok hampir selalu terjadi dalam kehidupan sosial, baik itu konflik kecil maupun besar, baik itu berupa perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan yang lebih mendalam. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai mediator yang menawarkan solusi yang adil dan rasional untuk menyelesaikan sengketa. Misalnya, dalam kasus sengketa kontrak antara dua pihak, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase, di mana pihak yang dirugikan dapat memperoleh ganti rugi atau penyelesaian yang memadai. Begitu pula dalam kasus pidana, hukum memberikan prosedur yang jelas untuk menangani pelanggaran yang dilakukan, mulai dari penyidikan hingga peradilan, dengan tujuan memberikan keadilan bagi korban dan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Oleh karena itu, sistem hukum tidak hanya berfungsi untuk mencegah konflik, tetapi juga untuk memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat (Hanisa & Firdaus, 2023).

Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat bisa saja berubah karena perkembangan teknologi, budaya, dan pemikiran manusia. Hukum menjadi sarana untuk merespons perubahan tersebut dan membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, perubahan dalam undang-undang yang mengatur hak perempuan atau hak asasi manusia menunjukkan bagaimana hukum dapat diubah untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih modern dan progresif. Hal ini terlihat dalam berbagai perubahan legislasi, seperti pengesahan undang-undang yang lebih mendukung kesetaraan gender, hak LGBT, atau perlindungan terhadap minoritas. Hukum harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan tersebut, tanpa kehilangan esensinya sebagai pengatur ketertiban. Dalam hal ini, hukum berperan untuk menjaga keseimbangan antara konservatisme tradisional dan kebutuhan akan pembaruan yang relevan dengan keadaan zaman.

Namun, meskipun hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, dalam kenyataannya penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakadilan dalam penerapan hukum itu sendiri. Misalnya, adanya praktik diskriminasi dalam sistem peradilan, di mana kelompok tertentu mungkin tidak diperlakukan dengan adil berdasarkan status sosial, ras, atau gender mereka. Selain itu, korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau hakim, juga bisa merusak integritas sistem hukum. Tanpa penegakan hukum yang adil dan transparan, hukum akan kehilangan kredibilitasnya dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan profesionalisme, kejujuran, dan akuntabilitas. Hanya dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak tanpa kecuali.

Hukum juga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk dan mencerminkan nilai-nilai budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Setiap sistem hukum, baik itu hukum nasional atau hukum adat, tidak terlepas dari konteks budaya di mana hukum tersebut diterapkan. Hukum sering kali merefleksikan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat, dan dalam banyak kasus, hukum dan budaya berjalan seiring untuk menjaga keteraturan sosial. Misalnya, di Indonesia, hukum adat masih memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat di beberapa daerah, meskipun hukum negara sudah berlaku secara nasional. Hukum adat ini mencerminkan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, seperti gotong royong, penghormatan terhadap alam, dan rasa saling menghargai antarwarga. Walaupun demikian, hukum negara modern tetap diperlukan untuk menjaga kesatuan dan integrasi nasional, terutama

dalam menghadapi tantangan global yang memerlukan standar hukum yang universal, seperti hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup (Hanisa & Firdaus, 2023).

Sistem hukum berfungsi untuk mengatur manusia dan masyarakat dengan cara memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban, menyelesaikan konflik, serta mendorong perubahan sosial yang positif. Hukum memberikan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama serta menawarkan solusi yang adil dan rasional bagi masalah yang muncul. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, penegakan hukum harus dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan tanpa diskriminasi. Hukum juga harus mampu mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat, sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Tanpa sistem hukum yang efektif dan adil, masyarakat akan kesulitan untuk hidup harmonis dan teratur. Oleh karena itu, hukum bukan hanya sebuah alat yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga merupakan cermin dari kemajuan dan perkembangan suatu bangsa.

Sistem Hukum Menghadapi Tantangan Dalam Penerapannya di Masyarakat

Sistem hukum di setiap negara dirancang untuk mengatur dan menegakkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapannya seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakadilan dalam proses peradilan. Meskipun sistem hukum bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak, kenyataannya, tidak jarang hukum diterapkan secara diskriminatif. Faktor seperti status sosial, ekonomi, ras, dan bahkan gender dapat memengaruhi bagaimana hukum diterapkan. Contohnya, orang yang lebih kaya atau berpengaruh seringkali memiliki akses yang lebih baik ke layanan hukum, sementara mereka yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang rendah sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum. Ketidaksetaraan semacam ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan dan merusak kredibilitas hukum di mata masyarakat (Lauren, 2023).

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh sistem hukum adalah korupsi dalam aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, dan pejabat peradilan lainnya seharusnya menjadi pelindung keadilan dan penerap hukum yang tidak memihak. Namun, dalam banyak kasus, mereka terlibat dalam praktek korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau menerima suap, yang dapat mengubah jalannya proses peradilan. Korupsi ini tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban, tetapi juga menggerogoti fondasi moral sistem hukum itu sendiri. Dalam hal ini, banyak orang yang merasa bahwa hukum tidak berlaku secara adil dan bahwa keadilan hanya bisa dicapai dengan uang atau pengaruh. Praktik-praktik semacam ini membuat masyarakat merasa bahwa hukum tidak lagi menjadi alat untuk menegakkan keadilan, melainkan menjadi sarana untuk memperkaya diri atau melindungi mereka yang berkuasa.

Sistem hukum juga menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum yang lemah. Banyak negara atau wilayah yang memiliki undang-undang yang sangat baik dan sesuai dengan prinsip keadilan, tetapi seringkali gagal dalam implementasinya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, atau ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka secara efisien. Misalnya, di beberapa daerah, kurangnya jumlah polisi atau pengadilan yang beroperasi dengan baik dapat menyebabkan penundaan dalam penanganan kasus atau bahkan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, dalam beberapa kasus, kegagalan dalam menegakkan hukum dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum, yang memungkinkan penyimpangan dari prosedur hukum yang semestinya. Oleh karena itu, meskipun hukum sudah ada, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa hukum diterapkan dengan konsisten dan tanpa kompromi (Danurahman & Kusdarini, 2021).

Di samping itu, sistem hukum juga menghadapi tantangan dari perubahan sosial yang cepat dan tuntutan global. Dunia saat ini berkembang dengan pesat, dan banyak hukum yang sudah ada tidak mampu mengimbangi laju perubahan ini. Misalnya, dengan pesatnya perkembangan teknologi, banyak isu hukum baru yang muncul, seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan hak-hak digital yang belum diatur dengan baik oleh banyak sistem hukum yang ada. Selain itu, globalisasi juga membawa tantangan tersendiri, di mana hukum di satu negara bisa berbenturan dengan hukum internasional atau hukum negara lain. Di satu sisi, negara-negara berusaha mempertahankan kedaulatan hukum mereka, sementara di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada tuntutan untuk mengikuti standar global dalam hal hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan perdagangan internasional. Oleh karena itu, sistem hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat saat ini.

Tantangan yang tidak kalah penting dalam penerapan hukum adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Seringkali, masyarakat tidak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku, atau mereka tidak tahu bagaimana cara mengakses keadilan apabila hak-hak mereka dilanggar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan hukum yang terbatas dan kurangnya sosialisasi tentang hak-hak hukum bagi warga negara. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hukum, masyarakat cenderung tidak dapat melindungi hak-hak mereka atau tidak mengetahui bagaimana cara menuntut keadilan (Lauren, 2023). Selain itu, ketidaktahuan ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi ketidakpahaman tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerapan hukum, sangat penting bagi negara dan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan hukum dan kesadaran hukum agar setiap individu tahu hak-haknya dan bagaimana cara menegakkan keadilan.

KESIMPULAN

Pengaruh sistem hukum dalam dinamika sosial kehidupan masyarakat sangat besar, karena hukum berfungsi sebagai alat pengatur yang mengatur interaksi antarindividu, kelompok, dan negara. Hukum tidak hanya berperan dalam

menciptakan ketertiban dan keamanan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sistem hukum yang diterapkan dengan adil dan tepat dapat memberikan landasan yang kuat bagi terciptanya harmoni dalam kehidupan sosial, di mana hak-hak setiap individu dilindungi, dan norma-norma sosial dihormati. Namun, apabila penerapan hukum tidak memperhatikan konteks sosial atau terjadi ketidakadilan dalam proses penegakannya, hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan, ketidakpuasan, bahkan konflik sosial dalam masyarakat. Ketidakselarasan antara hukum dengan kebutuhan sosial yang berkembang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menimbulkan perlawanan terhadap sistem tersebut.

Selain itu, perubahan dalam dinamika sosial masyarakat, seperti perubahan nilai-nilai budaya, kemajuan teknologi, atau fenomena sosial baru, juga mempengaruhi cara hukum diterima dan diterapkan. Hukum yang tidak mampu mengikuti perkembangan ini berisiko menjadi usang dan tidak relevan dengan realitas sosial yang ada. Oleh karena itu, hukum harus dirancang untuk bersifat adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Penting bagi sistem hukum untuk dapat merespons tantangan dan kebutuhan yang muncul dalam masyarakat, baik itu yang berkaitan dengan keadilan sosial, perlindungan hak individu, atau isu-isu baru yang berkembang. Sistem hukum yang responsif akan lebih mampu menjaga kestabilan dan harmoni dalam masyarakat, memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi setiap individu.

SARAN

Demi terciptanya sistem hukum yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat, disarankan agar pembuat kebijakan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dalam proses pembuatan dan evaluasi kebijakan hukum. Partisipasi publik yang lebih luas dalam proses legislasi dapat memastikan bahwa hukum yang dihasilkan lebih representatif, mencerminkan kebutuhan, dan melindungi kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, melalui pendidikan hukum yang lebih intensif di semua lapisan masyarakat. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga dan mengawasi penerapan hukum, serta menyadari hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga diterima dan dihormati oleh seluruh anggota masyarakat, serta dapat menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84-99.
- Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. (2022). Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 81-90.
- Danurahman, J., & Kusdarini, E. (2021). Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 151-160.
- Hanisa, I., & Firdaus, S. U. (2023). Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia. *Sovereignty*, 2(4), 340-353.
- Lauren, C. C. (2023). Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 874-884.